

Pengaruh *Financial Distress*, *Idle Cash* dan Opini Laporan Keuangan terhadap Pengelolaan SILPA Pemerintah Daerah



Abdul Rohman¹, Rochmawati Daud², Arista Hakiki³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

¹abdulrohman@fe.unsri.ac.id, ²rohmatidaud@unsri.ac.id, ³aristahakiki@unsri.ac.id

INFO ARTIKEL

Tanggal revisi:
12 Agustus 2021

Tanggal diterima:
13 September 2021

Tanggal diterbitkan online:
15 September 2021

Kata Kunci:

Financial Distress, Idle Cash, Opini, Silpa, Slow and back loaded budget absorption.

ABSTRAK

The purpose of this study was to determine whether financial distress, idle cash, and opinions affect the management of SILPA in the local government and how they play a role in detecting the phenomenon of Slow and Back Loaded Budget Absorption. The population of our study is the provincial and district and city governments. As for our research sample, namely local governments in the Republic of Indonesia, amounting to 542. Tests using multiple regression techniques. The results showed that financial distress and opinion had no effect on the management of SILPA. Meanwhile Idle cash has an effect on the management of SILPA. This shows that the remaining excess of last year's calculation (SiLPA) has an influence on the management of the remaining calculation of the current year (SILPA) which indicates that the calculation of the current year's activities has not been completed. Thus this indicates the phenomenon of Slow and Back Loaded Budget Absorption.

1. PENDAHULUAN

Penyimpanan kas Pemerintah daerah hasil Penerimaan kas dan pengeluaran kas menggunakan mekanisme bank. Mekanisme bank yang dimaksud adalah pembukaan rekening kas umum daerah (KUD) oleh pemerintah daerah untuk lalu lintas kas baik penerimaan maupun pengeluaran. Pemerintah Daerah menggunakan mekanisme non tunai

yaitu menggunakan pembayaran melalui bank. Penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah diterima dan disimpan di rekening bank. Pengeluaran pemerintah juga melalui rekening bank. Dengan demikian Saldo kas (bank) langsung dapat dimonitor dari rekening kas (bank) yang ditunjuk. Pada akhir tahun akan diperoleh gambaran kas iddle yang ada pada bank tersebut. Analisis terhadap kas (diolah dari berbagai sumber) yang mengendap di bank pada tiap akhir tahun (variasi bulan akhir periodenya) menunjukkan saldo yang sangat besar dari tahun ke tahun. Data yang ada dari berbagai sumber yang kami peroleh menunjukkan dari tahun 2012 sebesar Rp 99.2 triliun, bulan Desember tahun 2013 sebesar Rp 92,4 triliun, tahun 2014 sebesar 2014 sebesar Rp 113.1 triliun, tahun 2015 sebesar 27,72 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 214,7 triliun. Hal ini menunjukkan adanya fluakuasi dengan akhir pada tahun 2019 menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini tentunya menunjukkan gejala yang kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada lingkungan pemerintah daerah yang memiliki kas yang mengendap tersebut (Rahmawati, 2017).

Faktor penyebab terjadinya kas yang mengendap sangat bervariasi. Penulis melakukan penelitian terhadap berbagai sumber untuk mengungkap penyebab terjadinya kas yang mengendap tersebut. Penyebab kas pemerintah daerah yang mengendap di bank antara lain adanya pihak ketiga belum mengambil uangnya hingga menjelang akhir tahun, kapasitas daerah lemah mengelola anggaran, adanya unsur kesengajaan, faktor politik, fungsi Bank Pembangunan Daerah sebagai kasir pemda menyebabkan kas semakin banyak di Bank, hambatan pada pelaksanaan proyek dan kegiatan sehingga belum dapat dilunasi pembayarannya (sebagian kegiatan fisik atau proyek belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan namun belum selesai, sehingga belum dapat dilunasi pembayarannya), Keterlambatan penyaluran dana Pemerintah Pusat ke Daerah juga turut andil meningkatkan endapan dana Pemda di perbankan, imbal hasil dalam bentuk bunga dari bank persepsi, pola belanja yang kurang baik, daerah tidak memiliki rencana anggaran yang matang, pemda sangat berhati-hati dalam mengeksekusi dana, pemda merasa lebih aman menyimpan uang APBD di bank daripada menggunakannya untuk kegiatan ekonomi di daerahnya atau masyarakat, dan pembayaran pajak oleh masyarakat yang meningkat jelang tenggat waktu.

Situasi tersebut menunjukkan adanya surplus sumber daya di pemerintah daerah dalam bentuk kas dan setara kas. Situasi lain adalah adanya pemerintah daerah yang memiliki situasi kekurangan dana. Pemerintah daerah yang memiliki sumberdaya (kas dan setara kas) kan menjadi tidak atau kurang mampu dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi publik (masyarakat). Jika situasi ini terjadi maka pemerintah daerah akan mengalami gejala *financial distress*. *Financial distress* menurut Ross dan Westerfield dalam Tubels (2015) adalah suatu kondisi dimana *cash flow* operasi perusahaan tidak mampu menutupi atau mencukupi kewajiban saat ini (Trussel & Patrick, 2013). Menurut Jones dan Walker (2007), *financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Walker S. J., 2007). Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut. Kondisi kekurangan atau ketidakterediaan dana ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami kesulitan keuangan. *Financial distress* dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan (*corporate failure*) pada kontraknya yang akhirnya dapat dilakukan restrukturisasi finansial antara perusahaan, kreditur, dan investor. Sedangkan pada sektor pemerintahan, *financial distress* adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan. Salah satu standar mutu pelayanan ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah alokasi belanja modal. Adapun standar mutu pelayanan berupa belanja modal adalah sebesar 30% berdasarkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Kemendagri, 2016). Analisis data Komposisi belanja modal dan belanja (data dari kemenkeu) adalah rata rata tahun 2015 sebesar 25% tahun 2016 sebesar 24 %, tahun 2017 sebesar 22%, tahun 2018 sebesar 20% dan tahun 2019 sebesar 7% (per 20 agustus 2019). Data ini diolah dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia meliputi provinsi, kabupaten dan kota. Tahun 2015 sebanyak 542 hingga 2019 sebanyak 537 Pemernitah daerah (terdapat daerah yang belum menyerahkan data pada kemenkeu) (DJPk, 2019).

Financial distress pemerintah daerah sumber lain didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman. Kemampuan yang dimaksud dapat diindikasikan dengan *debt service coverage ratio* (DSCR) sebagaimana diatur dalam PP No. 54/2005 tentang pinjaman daerah. Dalam

peraturan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah jika mempunyai tingkat DSCR minimal 2,5 (dua setengah). Bagi pemerintah daerah yang tidak mampu mencapai tingkat DSCR tersebut, tidak diperbolehkan untuk melakukan pinjaman daerah karena dkuatirkan akan mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman. Apabila pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman (mempunyai DSCR kurang dari 2,5) dapat dinyatakan dalam status *financial distress*. Situasi diatas menunjukkan sistem pengelolaan keuangan pemeirntah daerah yang harus terus menerus diperbaiki agar tidak mengalami *idle cash* dan gejala *financial distress*.

Sistem pengelolaan keuangan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD masih harus terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ketua BPK yang menyatakan bahwa hasil Pemeriksaan BPK RI (Opini) Semester II Tahun 2019 dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD serta badan-badan lainnya masih memerlukan peningkatan, di antaranya kualitas penyusunan laporan keuangan, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern (BPK,2019).

Temuan BPK dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester menunjukkan masih adanya kelemahan pengelolaan keuangan dan aset. Hal tampak dari hasil pemeriksaan IHPS I tahun anggaran 2017. IHSP I-2017 merupakan laporan atas ringkasan dari laporan hasil pemeriksaan. Sebanyak 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK sepanjang semester I-2017 yang terdiri dari 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Adapun pihak yang diperiksa terdiri dari 113 pemerintah pusat, 537 pemerintah daerah, serta 37 BUMN dan badan lainnya. Adapun hasil yang diperoleh terdapat 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan. Rincian temuan ini antara lain permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Jumlah masih masing temuan adalah 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 2,25 triliun (Sugianto, 2019).

Permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 4.707 senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 permasalahan senilai Rp 1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 permasalahan senilai Rp4,89 triliun, serta kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 permasalahan senilai Rp 18,44 triliun. Selain itu, terdapat 2.842 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Sedangkan dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 2,25 triliun, terdapat 12 permasalahan ketidakhematan senilai Rp 11,96 miliar, 30 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp 574,31 miliar, dan 122 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Hal ini akan menyebabkan variasi perolehan opini BPK.

Dari uraian diatas, fenomena yang ada baik *financial distress*, *idle cash* dan opini pemeriksaan laporan keuangan memiliki faktor pendorong terjadinya peristiwa tersebut. Banyak hal yang sudah saya sampaikan diatas faktor pendorong dari berbagai aspek. Salah satu pendorongnya peneliti menduga adanya perolehan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada akhir periode. Pemerintah daerah tiap tahun menyisakan kas dalam bentuk SILPA. Pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dari tahun ke tahun tampak adanya fenomena yang bervariasi jumlah SILPA pada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun provinsi. Dalam laporan realisasi anggaran terdapat fenomena menarik yang perlu dikaji lebih mendalam. Fenomena menarik dalam pengelolaan keuangan daerah belakangan ini, yakni seringnya terjadi sisa anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya (APBD) Pemda telah menetapkan prediksi akan terjadi surplus atau defisit, yakni pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah atau pendapatan mampu mencakup seluruh belanja sehingga surplus (Syukri, 2013). Defisit atau surplus pada APBD diselesaikan dengan mekanisme pembiayaan dan hasilnya pada buku APBD selalu *balance*, namun demikian laporan realisasi anggaran menunjukkan selalu adanya SILPA (berbeda dengan rencana).

Fenomena diatas didukung dengan data realisasi APBN pada Alokasi Transfer ke Daerah mengalami peningkatan dari Rp 411,3 triliun (2011) menjadi Rp 623,1 triliun (2015). Peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan belanja APBD dari Rp 518,7 triliun (2011) menjadi Rp 948,9 triliun (2015). Pada tahun 2016 realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN mencapai Rp 710,9 triliun dan alokasi tahun 2017

sebesar Rp 764,9 triliun. Di sisi lain, jumlah simpanan Pemda di perbankan posisi akhir Desember cukup tinggi dan meningkat dari Rp80,4 triliun (2011) menjadi Rp 103,8 triliun (2015). Bersamaan dengan peningkatan jumlah simpanan Pemda di perbankan, terjadi peningkatan SiLPA Pemda dari Rp78,5 triliun di tahun 2011 menjadi Rp101,6 triliun di tahun 2015. Sementara itu, capaian indikator pembangunan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang menggembirakan karena masih terdapat beberapa provinsi dengan SiLPA relatif tinggi namun capaian pembangunannya masih berada di bawah capaian nasional.

Simpanan Pemerintah Daerah di perbankan dan SILPA yang relatif tinggi mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah. Gejala tersebut menjadi perlu untuk dianalisis mengingat sumber pendanaan utama otonomi daerah dikontribusi oleh transfer dari Pemerintah pusat. Sesuai dengan hal tersebut, evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SILPA dan simpanan Pemda di perbankan yang cukup tinggi serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah khususnya yang terkait dengan kebijakan transfer ke daerah.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah *financial distress*, *idle cash*, dan opini berpengaruh pada pengelolaan SILPA Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah seluruh variabel dapat mempengaruhi pada variabel SILPA. Namun demikian juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah *financial distress*, *idle cash*, dan opini dalam upaya untuk mendeteksi fenomena *Slow and Back Loaded Budget Absorption*.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)

Sisa anggaran adalah dana milik pemda yang belum terpakai selama satu tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Dalam konsep anggaran berbasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah uang atau kas Pemda yang belum terpakai. Ada dua bentuk sisa anggaran, yakni SiLPA dan SILPA. Sisa anggaran terjadi karena banyak faktor antara lain karena adanya regulasi, perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa

(Ramadhani & Setiawan, 2019). SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Sebagai contoh, SiLPA di dalam APBD 2012 adalah SILPA tahun anggaran 2011. Sedangkan SILPA dalam APBD 2012 adalah “rencana” sisa anggaran pada akhir tahun 2012, yang akan menjadi definitif ketika Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah ditetapkan. Besarnya anggaran yang masih tersisa pada akhir tahun juga disebabkan karena perencanaan anggaran dan terkonsentrasinya pelaksanaan anggaran pada akhir tahun (Irwan, Mochamad, & Hatta, 2018). Selain itu terdapat faktor keinginan SKPD untuk menunda penyerapan anggaran dan kinerja pemerintah daerah (Heriberta, Tasman, & Yanilia, 2018).

Di beberapa daerah dibuat kebijakan (misalnya di Provinsi Jawa Tengah) bahwa SILPA dalam APBD di Pemda kabupaten dan kota diharuskan bernilai 0 (nol) atau nihil (tanpa nilai rupiah). Artinya, tidak direncanakan terjadi selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran daerah. Hal ini dimaknai sebagai anggaran berimbang (*balanced budget*). Pada prinsipnya, kebijakan ini untuk mendorong Pemda kabupaten/kota untuk lebih bertanggungjawab terhadap penggunaan uang publik, sehingga sejalan dengan konsep *value for money*, yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

Financial Distress

Menurut Jones dan Walker (2007), financial distress merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Walker S. J., 2007). Krisis fiskal dengan beberapa penulis menghubungkan masalah ini dengan kurangnya sumber daya organisasi dan keterampilan manajerial yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memberikan layanan berkualitas dengan cara yang efisien atau untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi (Carmeli, 2003).

Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut. Kondisi kekurangan atau ketidaktersediaan dana ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami kesulitan keuangan *Financial distress* dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan (*corporate failure*) pada kontraknya yang akhirnya dapat dilakukan restrukturisasi finansial antara perusahaan, kreditur, dan investor. Sedangkan pada sektor pemerintahan, *financial distress* adalah ketidakmampuan pemerintah untuk

menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan. Selain financial distress juga disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengelolaan anggaran dan meningkatnya biaya pegawai (K.Urahn, Ettliger, Atwell, Fehr, Huh, & Russel, 2013). Salah satu standar mutu pelayanan ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah alokasi belanja modal. Adapun standar mutu pelayanan berupa belanja modal adalah sebesar 30% berdasarkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Financial distress pemerintah daerah sumber lain didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman. Kemampuan yang dimaksud dapat diindikasikan dengan *debt service coverage ratio* (DSCR) sebagaimana diatur dalam PP No. 54/2005 tentang pinjaman daerah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah jika mempunyai tingkat DSCR minimal 2,5 (dua setengah). Bagi pemerintah daerah yang tidak mampu mencapai tingkat DSCR tersebut, tidak diperbolehkan untuk melakukan pinjaman daerah karena dkuatirkan akan mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman. Apabila pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman (mempunyai DSCR kurang dari 2,5) dapat dinyatakan dalam status financial distress. Situasi diatas menunjukkan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang harus terus menerus diperbaiki agar tidak mengalami *idle cash* dan gejala *financial distress*.

Idle Cash

Idle cash memiliki sebutan lain yaitu kas mengangur. *Idle money* pada Pengelolaan keuangan sektor Publik adalah uang yang terdapat di Rekening Kas umum, yang tidak digunakan untuk membiayai operasional kegiatan tertentu dan berpotensi menghasilkan bunga uang (Arham, 2015). Dengan bahasa sederhana Idle money adalah uang yang menganggur dan tidak digunakan secara efektif. Dari sisi ini *idle cash* berarti merupakan kas yang lebih atau kelebihan kas.

Peraturan menteri keuangan menjelaskan definisi kelebihan kas. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 dinyatakan bahwa kelebihan kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening KUN melebihi kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo

awal dan Saldo Kas Minimu (SKM). Selama ini pemerintah sebenarnya memiliki dana idle berupa dana SAL yang terkadang digunakan untuk menutupi kekurangan kas sementara maupun sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Menurut mantan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dana *idle* ialah dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan yang jumlahnya melebihi kebutuhan belanja APBD selama 3 bulan (Kemenkeu, 2019).

Kriteria dana idle dalam kajian ini ialah sebagai berikut: **pertama**, BUN memiliki kewenangan untuk mengakses dana tersebut. Kewenangan ini didasari oleh peraturan yang menjadi dasar bagi BUN dalam melakukan monitoring dan mengelola dana dalam rekening tersebut. **Kedua**, dana tersebut jumlahnya melebihi kebutuhan pengeluaran rekening tersebut minimal selama 3 bulan dan menganggur sampai akhir tahun anggaran. Dana yang menganggur tersebut jumlahnya melebihi kebutuhan pengeluaran/kewajiban rekening tersebut dan dana tersebut menganggur sampai dengan akhir anggaran. **Ketiga**, tidak dibatasi penggunaannya. Dana *idle* tersebut tidak terikat earmarked yaitu dibatasi penggunaannya yang bisa disebabkan oleh dua hal yaitu perikatan dengan pihak ketiga dan karena adanya regulasi. Sehingga dana tersebut sudah ditentukan tujuan penggunaannya dan tidak bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan kas oleh BUN. **Keempat**, BUN Pusat sewaktu-waktu dapat dengan mudah memindahkan dana idle dari rekening asal ke RKUN (begitu juga sebaliknya). Dana *idle* tersebut dapat dipindahkan oleh BUN tepat waktu, tidak terdapat biaya/fee yang besar, dan syarat-syarat lain yang dapat menghambat proses pemindahbukuan. **Kelima**, Rekening termasuk dalam rekening yang dikelola oleh Kuasa BUN Pusat. Rekening yang ada termasuk dalam rekening yang dikelola oleh Kuasa BUN Pusat (Dit. PKN) (Kemenkeu, 2019). Untuk penelitian dengan obyek pemerintah daerah kriteria diatas harus dimodifikasi yang dimaksud BUN adalah bendahara umum daerah untuk konteks pengelola keuangan pemerintah daerah. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan indikator sisa anggaran tahun berjalan sebagai indikator adanya *idle cash* pada pemerintah daerah.

Opini

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah akan diaudit atau diperiksa oleh auditor dalam hal ini BPK. Auditor akan menyusun laporan hasil pemeriksaan dalam bentuk

laporan hasil pemeriksaan (BPK, 2017). Opini BPK (Auditor) terdiri dari beberapa tingkatan yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberi pendapat (BPK, 2017) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi. Pelaporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Hal ini sejalan dengan kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan (BPKAD, 2017).

Penelitian Terdahulu

Penelitian pendahulu terkait dengan sisa lebih mendekati nol berasal dari penelitian yang berjudul *Earnings Management Around Zero: A motivation to local politician signalling competence* yang ditulis oleh Augusta Ferreira, João Carvalho & Fátima Pinho. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa bahwa politisi lokal termotivasi untuk mengelola pendapatan melalui keinginan untuk menunjukkan tingkat kompetensi tinggi dengan tujuan pemilihan ulang. Secara umum, hasil yang diperoleh konsisten dengan teori agensi (Ferreira, Carvalho, & Pinho, 2013). Penelitian berikut berjudul *Local Governments' Earnings Management: Greek and Italian Evidence* yang ditulis oleh Sandra Cohen, Marco Bisogno dan Ioanna Malkogianni bertujuan untuk meneliti praktik manajemen laba di pemerintah daerah, dengan fokus pada dua negara Mediterania, yaitu Yunani dan Italia yang memiliki sistem administrasi yang sebanding. Menurut teori pilihan publik, kepentingan yang bertentangan antara politisi yang mengejar pemilihan ulang dan pemilih yang memantau tindakan politisi untuk menilai keselarasan mereka dengan kesejahteraan sosial menciptakan tanah subur untuk praktik manajemen laba. Temuan dari bukti analisis bahwa Pemda terlibat dalam pengelolaan pendapatan (*earning management*), faktor utama adalah siklus pemilihan, terutama dalam kasus pemerintah kota Yunani (Cohen, Bisogno, & Malkogianni, 2016).

Penelitian lainnya dari Halima Gaddour (2012) menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan akrual untuk tujuan menghasilkan dan melaporkan surplus yang kecil dan diskresi akrual akan meningkat manakala terjadi situasi defisit anggaran (Gaddour, 2012). Sementara hasil penelitian Kuroki (2018) meneliti apakah manajer mengelola laba dalam organisasi nirlaba organisasi, khususnya perguruan tinggi dan universitas swasta Jepang (M.Kuroki, 2018). Hasilnya menunjukkan bahwa *Private college* Jepang & universitas memiliki item pengeluaran modal diskresi khusus yang memungkinkan manajer *private college* & Universitas untuk menyesuaikan pendapatan lebih mudah. Berharap bahwa manajemen pendapatan di *private college* & universitas Jepang ada untuk mengurangi penghasilan lebih banyak daripada ditemukan oleh penelitian sebelumnya dari organisasi nirlaba karena *private college* & universitas mengelola item ini sering dan memiliki insentif pemangku kepentingan yang berbeda (siswa dan pemerintah). Dengan menguji 2.973 *private college* & universitas dari 2009 hingga 2013 dan dengan menggunakan analisis distribusi pendapatan. Penelitian ini menemukan bukti manajemen laba mendekati nol untuk menghindari kerugian, dan kuat bukti keputusan penurunan pendapatan oleh *private college* & universitas. Hasil ini menunjukkan bahwa *private college* & universitas di Jepang memiliki insentif untuk mengelola pendapatan mendekati nol, terutama insentif penurunan pendapatan, seperti dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Leone dan Van Horn (2005) menggambarkan adanya manajemen laba untuk menyesuaikan akrual diskresioner untuk memenuhi kisaran tepat di atas nol di rumah sakit nirlaba sejak nirlaba memiliki kerugian-penghindaran dan insentif penurunan pendapatan. Insentif sebelumnya timbul dari efek kerugian pada reputasi CEO atau untuk mengurangi biaya hutang, dan insentif yang terakhir muncul dari mempertahankan status bebas pajak rumah sakit, menarik sumbangan, atau menerima konsesi harga dari pembayar pihak ketiga.

Topik penelitian ini telah banyak diteliti mulai tahun 1985. Tahun 1985 yang dilaksanakan oleh Healy yang meneliti tentang total akrual. Penelitian pada masa awal ini berhasil merumuskan formula perhitungan total akrual. Pada tahun 1986 oleh De Angelo yang berhasil melanjutkan penelitian tahun sebelumnya dari Healy. Angelo berhasil mengembangkan formula awal yang dihasilkan Healy. Penelitian dilanjutkan oleh Jones tahun 1991. Jones meneruskan dua penelitian sebelumnya dan menemukan pengertian diskresi akrual dan berhasil merumuskan diskresi akrual dengan baik. Penelitian Jones

menjadi tonggak dalam bidang earning management. Keberhasilan penelitian ini dilanjutkan oleh Dechow Tahun 1995. Pada masa ini Dechow, Sloan dan Sweeney berhasil melakukan modifikasi penelitian Jones dan memperoleh perspektif baru dan pengembangan formula Jones dengan melakukan modifikasi.

Perspektif lain pada aspek diskresi akrual dilakukan oleh peneliti Rangan tahun 1998 dan oleh Teoh serta tahun 2000 oleh Ducharme. Ducharme et al (2000) meneliti manajemen laba murni dengan tiga variabel yaitu pilihan metode akuntansi, revisi estimasi dan percepatan penangguhan pendapatan dan beban. Tahun 2006 oleh Yoon dengan Model Jones, dimodifikasi untuk negara yg sedang berkembang Korea. Selanjutnya pada tahun 2011 oleh MD Aminul Islam Ruhani Ali dengan model modifikasi Jones seperti pendapatan, beban penyusutan, beban tunjangan pensiun, keuntungan penjualan aset atau kerugian dengan model dimodifikasi sangat efektif dalam mendeteksi manajemen laba dalam konteks Bangladesh. Tahun 2016, 2017 dan 2018 Abdul Rohman, Ika SF dan Ermadiani. Penelitian di Indonesia yang telah dilaksanakan dari Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina dan Ermadiani adalah meneliti diskresi akrual terhadap pendapatan pemerintah daerah. Tahun 2019 Abdul Rohman, Rochmawati Daud, Arista Hakiki menguji pengaruh diskresi akrual, tingkatan akrual, opini dan faktor politik terhadap pengelolaan SILPA pemerintah daerah (upaya deteksi terhadap upaya pengelolaan SILPA mendekati nol).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Financial Distress* terhadap pengelolaan SILPA

Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota melaksanakan program kerja dengan pendanaan dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Penerimaan dan pengeluaran harus dikelola dengan baik dengan manajemen kas yang tepat. Ketimpangan kas akan menghasilkan kelebihan dan kekurangan bagi penyediaan layanan publik (program kerja). Pada akhir periode ini akan menghasilkan posisi kas dan setara kas yang lebih. Kas lebih pada akhir periode menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).

Financial distress merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai DSCR atau *Debt Service coverage ratio*. Jika nilai DSCR dibawah 2,5 maka

pemerintah daerah dikatakan akan mengalami *financial distress*. Sementara jika nilai DSCr Pemerintah Daerah diatas 2,5 maka kekauatan financial pemerintah cukup kuat untuk menopang belanja pemerintah. Dengan penjelasan ini maka hipotesis 1 dinyatakan sebagai berikut:

H1 : *Financial Distress Ratio* berpengaruh positif terhadap manajemen SILPA.

Pengaruh *Idle Cash* terhadap Manajemen SILPA.

Idle cash merupakan situasi dimana kas yang ada berlebih. Kas pada kondisi ini jika melebihi periode yang yang ditentukan maka akan menjadi *idle* atau menganggur. Kas menganggur menjadi tidak baik dampaknya bagi masyarakat banyak yang seharusnya menerima manfaat dana publik tersebut dalam bentuk hasil pembangunan yang merupakan realisasi program kerja pemerintah daerah. Kas menganggur jika terus menerus terjadi sepanjang periode akan mendorong terjadinya situasi dimana kas sisa lebih perhitungan anggaran akan meningkat. Situasi ini akan mengakibatkan meningkatnya SILPA pada akhir periode dan sisa lebih tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian masyarakat tidak maksimal menerima manfaat sumberdaya kas dan setara kas karena diendapkan dalam bentuk kas dan setara kas meskipun di bank memperoleh jasa giro. Dengan penjelasan tersebut maka hipotesis 2 dinyatakan sebagai berikut

H2 : *Idle Cash* atau kas menganggur (SiLPA) berpengaruh positif terhadap manajemen SILPA.

Pengaruh Opini berpengaruh positif terhadap pengelolaan SILPA.

Laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa oleh badan atau lembaga yang independen. BPK merupakan lembaga pemeriksa eksternal dan independen bagi laporan keuangan pemerintah daerah. BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang independen. Opini yang dihasilkan dapat menjadi *assurance* bagi kandungan SILPA didalam laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai SILPA akan bersifat normatif dalam pengertian mencerminkan nilai saldo angka angka akuntansi yang normal. Normal dalam pengertian tidak ada pengelolaan angka akuntansi didalamnya sesuai dengan motif manajemen atau dengan kata lain dampak positif terhadap SILPA.

Jika terdapat indikasi pengelolaan SILPA dan ini dapat dibuktikan oleh pemeriks laporan independen maka akan mempengaruhi perolehan opini. Perolehan opini salah

satunya ditentukan oleh ketaatan pada prinsip atau standar akuntansi. Ketaatan terhadap standar akuntansi merupakan implementasi dari *rule base mandatory*. Bilamana auditor independen memberikan opini yang tidak optimal maka hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap pengelolaan SILPA. Hal ini harus dihindari. SILPA harus disajikan dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan realisasi operasional pemerintah daerah (dampak positif). Dengan penjelasan diatas maka kami merumuskan Hipotesis 3 sebagai berikut:

H3 : Opini berpengaruh positif terhadap manajemen SILPA.

Pengaruh *Financial distress*, *idle cash* dan opini berpengaruh positif terhadap pengelolaan SILPA.

Dari uraian diatas kami menduga adanya relasi antara variabel secara individu pada masing-masing variabel independen dan dependen. Penulis juga menduga secara bersama-sama variabel *financial distress*, *idle cash* dan opini berpengaruh pada pengelolaan SILPA. Untuk itu hipotesis 4 dinyatakan sebagai berikut:

H4: *Financial distress*, *idle cash* dan opini berpengaruh positif terhadap manajemen SILPA.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa data laporan keuangan pemerintahan daerah berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas dan neraca. Sumber data penelitian ini adalah sekunder yaitu data yang berasal dari yang diterbitkan Pemerintah Daerah. Selain itu penelitian ini juga menggunakan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia. Laporan hasil pemeriksaan berupa ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). Ikhtisar hasil pemeriksaan terdiri dari semester I dan semester II pada tiap periode tahun anggaran. Selain itu juga akan menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Cara pengumpulan tersebut antara lain dengan mengajukan permintaan data pada pemerintah daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan atau Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan pada tiap Provinsi. Selain itu pengumpulan data juga dengan mengakses *official web* dari masing-masing pihak yang terkait. Data yang diminta pada para pihak diterima dalam bentuk *hard* maupun *softcopy* sedangkan data yang diakses melalui *official web* dapat didownload dalam bentuk file. Data yang tersedia dilakukan rekapitulasi dan kompilasi serta perhitungan sesuai kebutuhan masing-masing variabel penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Adapun sampel dari perwakilan pemerintah daerah tersebut berjumlah 542 pemerintah daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Sampel yang diperoleh tersebut diambil datanya berupa laporan keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. laporan tersebut berupalaporan realisasi anggaran (LRA) neraca, laporan arus kas (LAK) dan laporan operasional (LO) serta laporan arus kas. Selain itu digunakan juga ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 dan 2 dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Operasionalisasi Variabel

Pada penelitian ini, variabel operasional yang digunakan antara lain:

a. *Financial Distress*

Operasional variabel *financial distress* adalah rumusan belanja modal yang kurang dari 30% dari total belanja akan diberikan dummy 1 sebagai bobot pemerintah daerah yang memiliki gejala financial distress (Kemendagri, 2016).

b. *Idle Cash*

Operasionalisasi variabel *idle cash* berupa nilai kas dan setara kas yang positif. Dengan demikian nilai kas dan setara termasuk nilai rupiah bank pemerintah daerah yang positif

pada akhir periode akan dibobot sebagai pemerintah daerah yang memiliki idle cash (Suhanda, 2012).

c. Opini

Opini BPK terdiri dari beberapa tingkatan yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberi pendapat (BPK, 2017). Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skala nominal dari perolehan opini masing-masing pemerintah daerah atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Opini memiliki tingkatan 5. 1 untuk paling rendah hingga 5 paling tinggi.

d. Pengelolaan SILPA

Pengelolaan SILPA diukur dengan menggunakan pendekatan beberapa model dari perhitungan diskresi akrual. Pengelolaan SILPA ditunjukkan dengan nilai yang dihasilkan dari perhitungan diskresi akrual dengan menggunakan beberapa model diskresi akrual. Model yang digunakan antara lain dari Healy, Angelo, Leone dan Dechow. Secara umum model-model ini bila menghasilkan nilai diskresi akrual positif berarti menunjukkan adanya pengelolaan SILPA.

Pengukuran Variabel

Pengukuran yang digunakan pada variabel DSCR menggunakan ketentuan dari regulasi yang ada yaitu 2,5. Terkait kesulitan keuangan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah menetapkan persyaratan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah guna mengatasi kesulitan keuangan tersebut yaitu nilai *debt service coverage* ratio minimal 2,5. Jika nilai DSCR pemda diatas persyaratan 2,5 maka diberi bobot 3, jika sama diberi bobot 2 dan jika dibawahnya bobotnya 1. Pengukuran untuk variabel Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan (SiLPA) menggunakan pembobotan. Jika SiLPA lebih dari Rp171.205.106.584,82 maka nilai bobot SiLPA sebesar 3, jika nilai SiLPA = Rp 0 – Rp 1 Maka nilai Bobotnya SiLPA sebesar 1, dan jika dibawah 0 (minus) maka bobotnya sebesar 1.

Untuk mengukur variabel opini dengan menggunakan kelompok opini audit yang diberikan oleh BPKRI. Sesuai dengan Standar pemeriksaan keuangan maka terdapat 5 jenis opini yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) bobot 5, Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) bobot 4, Opini Wajar Tanpa Pengecualian

dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion) bobot 3, Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) bobot 2, Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer of Opinion) bobot 1.

Penelitian ini mengukur manajemen angka akuntansi (earning manajemen) dengan beberapa variabel yang terdapat pada beberapa persamaan yang telah ditemukan oleh para peneliti sebelumnya. Agar dapat mengukur manajemen angka akuntansi, maka perlu membedakan variabel penyusunnya. Pertama, akrual dari aktivitas normal dari suatu entitas (disebut akrual yang diharapkan). Akrual ini dihasilkan dari aktivitas manajemen Pemerintah Daerah yang tidak terdistorsi oleh praktik manajemen angka akuntansi. Kedua, akrual dari praktik manajemen angka akuntansi (disebut akrual abnormal). Akrual abnormal (ABNACCR) merupakan nilai akrual yang didalamnya terdapat praktik diskresi akrual manajemen Pemerintah Daerah. Akrual abnormal merupakan variabel *unobserve*, peneliti menghitungnya dengan menggunakan formula akrual abnormal yang merupakan perbedaan antara total akrual (ACCR) dan akrual yang diharapkan (EXPACCR) yang dinotasikan sebagai berikut:

$$ABNACCR_{jt} = ACCR_{jt} - EXPACCR_{jt}$$

atau

$$EXPACCR_{jt} = ACCR_{jt} - ABNACCR_{jt} \quad \text{Persamaan (1)}$$

Dimana:

ABNACCR	= Abnormal akrual
ACCR	= Total akrual (ACCR),
(EXPACCR)	= Akrual yg diharapkan
j	= menunjukkan entitas pengamatan j
t	= tahun t

Total akrual dapat diukur dengan menggunakan item-item pada neraca atau item-item pada laporan arus kas. Persamaan diatas dengan menggunakan data neraca. Hal ini memiliki kelemahan seperti yang dsampaikan oleh peneliti sebelumnya yaitu Hribar dan Collins. Hribar dan Collins menemukan bahwa frekuensi dan besarnya kesalahan yang disebabkan penggunaan data neraca berbasis akrual untuk menghitung nilai akrual, sehingga menyarankan penggunaan akrual diambil atau menggunakan data pada laporan keuangan lain yaitu laporan arus kas (Hribar & Collins, 2002).

Karena itu, untuk mengukur total akrual dari pernyataan arus kas sebagai berikut:

$$ACCR_{jt} = -DY_{jt} + COFO_{jt}$$

atau

$$ACCR_{jt} = COFO_{jt} - Dy_{jt} \text{Persamaan (2)}$$

Dimana;

DY_{jt} = Surplus (Defisit) untuk pemerintah daerah j pada tahun t
 Sisa lebih (kurang) diperoleh dari selisih antara surplus (defisit) ditambah dengan netto pembiayaan

COFO_{jt} = arus kas keluar bersih dari aktivitas operasi pemerintah daerah j pada tahun t.

Akrual yang diharapkan (EXPACCR) adalah perkiraan akrual yang menggunakan varian *cross-sectional* dari model Jones dan model Jones yang dimodifikasi (Dechow & Sweeney, 1995). Model ini telah banyak digunakan dan diuji untuk sektor swasta (DeFond, 1994). Dari sektor swasta, mereka juga telah digunakan oleh Leone dan Van Horn untuk mendeteksi manajemen angka akuntansi di rumah sakit nirlaba US (Leone & Van Horn, 2005) dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{ACCR_{jt}}{TA_{jt-1}} = \alpha \frac{1}{TA_{jt-1}} + \beta_1 \left(\frac{\delta REV_{jt}}{TA_{jt-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{PPE_{jt}}{TA_{jt-1}} \right) + B_{jt}$$

atau

$$B_{jt} = \frac{ACCR_{jt}}{TA_{jt-1}} - \left[\alpha \frac{1}{TA_{jt-1}} + \beta_1 \left(\frac{\delta REV_{jt}}{TA_{jt-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{PPE_{jt}}{TA_{jt-1}} \right) \right] \text{Persamaan (3)}$$

Dimana,

B_{jt} = Level Diskresi akrual pada instansi j tahun t

ACCR_{jt} = Total akrual untuk pemerintah daerah j pada tahun t

ΔREV_{jt} = Perubahan pendapatan dari jasa pemerintah daerah j pada tahun t,

PPE_{jt} = Gross aktiva tetap berwujud untuk pemerintah daerah j pada tahun t, dan

TA_{jt-1} = Total aset untuk pemerintah daerah j pada tahun

Dengan asumsi ΔREV_{jt} digunakan sebagai kontrol untuk tingkat normal modal kerja akrual terkait dengan pendapat dari layanan, dan PPE adalah variabel kontrol untuk tingkat normal amortisasi dan beban penyusutan akrual. Hal ini sejalan atau konsisten dengan literatur sebelumnya, dan untuk mengurangi masalah estimasi, semua variabel

diskalakan oleh *lag aset*.

Kami juga memperkirakan akrual yang diharapkan dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi (Dechow & Sweeney, 1995). Model ini merupakan model kontrol untuk manajemen laba karena peningkatan abnormal pada Suplus (defisit) Perhitungan Anggaran, dengan asumsi bahwa semua perubahan layanan pemerintah daerah yang bersifat kredit atau terutang (sehingga menimbulkan piutang bagi pemerintah daerah) adalah karena manajemen laba (angka akuntansi) ini. Persamaan yang digunakan sebagai bentuk modifikasi persamaan jones adalah sebagai berikut:

$$\frac{ACCR_{jt}}{TA_{jt-1}} = \alpha \left(\frac{1}{TA_{jt-1}} \right) + \beta_1 \left(\frac{\delta REV_{jt}}{TA_{jt-1}} - \frac{\delta AR_{jt}}{TA_{jt-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{PPE_{jt}}{TA_{jt-1}} \right) + B_{jt}$$

atau

$$B_{jt} = \frac{ACCR_{jt}}{TA_{jt-1}} - \left[\alpha \left(\frac{1}{TA_{jt-1}} \right) + \beta_1 \left(\frac{\delta REV_{jt}}{TA_{jt-1}} - \frac{\delta AR_{jt}}{TA_{jt-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{PPE_{jt}}{TA_{jt-1}} \right) \right] \text{Persamaan (4)}$$

Dimana δAR_{jt} = Perubahan piutang (debitur) untuk pemerintah daerah j pada tahun t.

Diharapkan akrual masing-masing entitas lokal (Pemerintah Daerah) diperoleh dari model estimasi (persamaan [3] dan [4]). Akhirnya, akrual abnormal (ABACCR_{jt}) dihitung seperti pada persamaan [1]. Akrual yang abnormal positif (menyiratkan manajemen pemerintah daerah penggunaan strategi diskresi akrual) yang menyebabkan surplus (defisit) meningkat, sedangkan akrual tidak normal negatif (menyiratkan manajemen pemerintah daerah menggunakan strategi diskresi akrual) yang menyebabkan surplus (defisit) menurun.

Untuk menguji manajemen laba, terlepas apakah entitas lokal mengikuti strategi surplus (defisit) perhitungan anggaran (pendapatan) meningkat atau pendapatan menurun, kita menggunakan akrual abnormal mutlak (Warfield & Wild, 1995). Dengan menggunakan rumusan atau persamaan dari Jones dan modified jones diatas, maka penulis akan dapat menguji pengaruh antara berbagai variabel diatas (independen) dengan variabel pengelolaan SILPA Pemerintah Daerah (dependen).

Analisis Data

Penelitian kami akan menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, kami akan menggunakan persamaan regresi. Untuk itu data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan regresi. Regresi yang digunakan adalah regresi berganda karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh telah diolah dengan menggunakan pendekatan regresi berganda dengan menggunakan aplikasi atau alat pengolah data berupa SPSS 23. Hasil olah data dari penelitian ditampilkan secara berurutan sebagai berikut:

Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel penelitian yang kami gunakan dengan menggunakan SPSS dapat kami sajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Statitstik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Stat	Stat	Stat	Stat	Stat	Stat	Std. Error	Statistic	Statistic
Opini	542	2.94	1.00	3.94	1572.90	2.9020	.02668	.62107	.386
DSCR	542	1.07	2.78	3.85	1993.16	3.6774	.00771	.17945	.032
SILPA	542	2.67	1.52	4.19	1737.69	3.2061	.02090	.48652	.237
SiLPA	542	1.86	1.12	2.98	1208.68	2.2300	.01805	.42011	.176
Valid N	542								

Sumber: Output SPSS

Data dari penelitian berjumlah 542 pemerirntah daerah. Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Nilai Minial opini1 dan tertinggi 3,94. Nilai DSCR terendah 2,78 dan tertinggi 3,85, sedangkan SILPA nilai terendah 1,52 dan tertinggi 4,19. SiLPA nilai terendah 1,12 dan tertinggi 2,98.

Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dapat berdistribusi normal atau tidak. Uji normal probability plot atau uji P-Plot merupakan salah satu alternatif yang

cukup efektif untuk mendeteksi apakah model regresi yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Dari grafik P-Plot yang dihasilkan dari pengujian, tampak bahwa titik-titik menyebar diantara garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat dikatakan memiliki nilai residualnya berdistribusi normal. Uji heteroskedasitas dalam regresi digunakan untuk mengetahui penyimpangan sumsi regresi (apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual dalam sebuah pengamatan dari model regresi). Model regresi yang baik adalah terbebas dari gejala atau gangguan heteroskedasitas. Pengujian heteroskedasitas dengan metode grafik *scatter plot* dilakukan dengan mengikuti ketentuan bahwa apabila data membentuk pola tertentu seperti titik-titik yang bergelombang, menyempit kemudian melebar maka dapat disimpulkan adanya indikasi gangguan heteroskedasitas, tetapi apabila data tidak membentuk pola tersebut dan titik-titik menyebar di bagian atas dan bawah angka 0 pada titik sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan heteroskedasitas.

Tujuan digunakannya uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel bebas atau variabel independet. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas dalam model regresi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melihat nilai korelasi antara variabel independet, meilihat nilai *condition index* dan *eigenvalue*, melihat *nilai tolerance* dan *variance inflating factor (VIF)*. Jika nilai VIF lebih kecil 10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi namun juka nilai VIF lebih besar dari 10 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Dari tabel pengujian menunjukkan bahwa nilai kolinieritas diatas nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Vif lebih kecil dari 10. Dengan demikian tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Hasil Uji Hipotesis

Selanjutnya analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Tujuan penelitian kami adalah pengaruh variabel bebas (*independen variable*) yaitu opini (X_1), DSCR (X_2), SILPA (X_3) terhadap variabel terikat (*dependen variable*) yaitu SiLPA (Y). Tabel 2 menyajikan persamaan regresinya.

Tabel 2. Coeficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-.428	.249	
Opini	.043	.021	.063
DSCR	.167	.074	.071
SILPA	.599	.027	.694

Sumber: Olah data SPSS

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat ditentukan model penelitian berikut ini:

$$Y = -0,428 + 0,43X_1 + 0,167X_2 + 0,599 X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (Silpa) sebesar 0,428. Nilai koefisien opini untuk variabel X_1 sebesar 0.43 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa diksresi akrual mempunyai hubungan yang searah dengan SILPA. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan opini satu satuan maka variabel SILPA (Y) akan naik sebesar 0.43 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai koefisien DSCR untuk variabel X_2 sebesar 0,167 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa diksresi akrual mempunyai hubungan yang searah dengan SILPA. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan DSCR satu satuan maka variabel SILPA (Y) akan naik sebesar 0,167 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai koefisien SiLPA untuk variabel X_3 sebesar 0,599 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa SiLPA mempunyai hubungan yang searah dengan SILPA. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan SiLPA satu satuan maka variabel SILPA (Y) akan naik sebesar 0.599 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen dilakukan uji t. Tabel 3 menyajikan hasil uji parsial dengan derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Parsial

Model	T	Sig.
1 (Constant)	-1721	0.086
DSCR	2.264	0.24

SiLPA	21.936	0.000
Opini	1.999	0.46

Sumber: Olah data SPSS

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3 menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *financial distress ratio* (DSCR) berpengaruh positif terhadap manajemen SILPA tidak dapat didukung. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig untuk DSCR adalah 0,24. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,24 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel DSCR tidak berpengaruh terhadap SiLPA. Nilai indikator DSCR tidak berpengaruh pada variabel pengelolaan atau manajemen SILPA. Pada hipotesis 2 yang menyatakan bahwa *Idle Cash* atau kas menganggur (SiLPA) berpengaruh positif terhadap manajemen SILPA terdukung. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig pada SiLPA adalah 0,00. Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,00 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Nilai t positif menunjukkan bahwa SILPA mempunyai hubungan yang satu arah dengan SiLPA. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel SiLPA berpengaruh signifikan terhadap SILPA. Hal ini menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan tahun lalu (SiLPA) memiliki pengaruh terhadap manajemen sisa perhitungan tahun berjalan (SILPA). SiLPA ditemukan dalam periode tahun setelah penutupan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan SiLPA baru dapat diketahui setelah selesainya pembukuan atau pada periode berjalan tahun berikutnya. Hal ini disebabkan karena belum selesainya perhitungan atas kegiatan tahun berjalan. Dengan demikian ini menunjukkan adanya fenomena *Slow and Back Loaded Budget Absorption*. Tabel 3 juga menyajikan hasil pengujian pada hipotesis 3 yang menyatakan bahwa opini berpengaruh positif terhadap manajemen SILPA tidak terdukung. Hal ini karena nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,46 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel opini tidak berpengaruh terhadap SiLPA atau bersifat negatif. Dengan demikian opini yang tinggi belum tentu akan menyebabkan SILPA yang tinggi. Atau dengan kata lain Opini yang tinggi akan menyebabkan rendahnya manajemen SILPA.

Pengujian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa *financial distress*, *idle cash* dan opini berpengaruh positif terhadap manajemen SILPA diuji secara simultan melalui Uji F. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	53.258	3	17.753	226.190	.000 ^b
Residual	42.225	538	.078		
Total	95.483	541			

a. Dependent Variable: SiLPA

b. Predictors: (Constant), SILPA, DSCR, Opini

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4 menunjukkan bahwa hipotesis terdukung. Hal ini dapat dilihat dari tabel F_{hitung} sebesar 226,190 dengan nilai probabilitas (sig)= 0,000. Nilai F_{hitung} 226,190 > F_{tabel} 1,16. dan nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,000 < 0,05; maka H_4 diterima. Dengan demikian berarti secara bersama-sama (simultan) DSCR, SILPA dan Opini berpengaruh signifikan terhadap Manajemen SILPA.

Pengujian Model dengan Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain (Santosa&Ashari, 2005:125). Hasil uji dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.747 ^a	.558	.555	.28015	.558	226.190	3	538	.000

Berdasarkan hasil pada tabel 5 menunjukkan bahwa model memiliki hubungan yang kuat antara variabel dependen dengan variabel independen. Hal ini tampak dari nilai R Square dan Adjusted R Square sebesar 55,5%. Nilai 55,5% menunjukkan bahwa hubungan variabel independen (Opini, DSCR dan SiLPA) dapat dijelaskan dengan kekuatan sebesar 55,5 dan sisanya 44,5 dijelaskan oleh faktor lain yang tidak kami teliti. Variabel bebas yang terdiri dari opini, dscr dan SiLPA memiliki hubungan yang kuat terhadap SILPA. Oleh karena nilai R Square atau nilai koefisien lebih dari 0,5 dan kurang dari 0,75 menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel kuat. Hal sesuai dengan pendapat Jonatan Sarwono dalam buku metode penelitian kuantitatif dan kualitatif tahun 2006 (Jonathan, 2006)

Pembahasan

Pengaruh *financial distress ratio* (DSCR) berpengaruh positif terhadap manajemen SILPA

Hipotesis pertama ini tidak dapat didukung hal ini karena nilai sig untuk DSCR adalah 0,24. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,24 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel DSCR tidak berpengaruh terhadap SiLPA. Nilai indikator DSCR tidak berpengaruh pada variabel pengelolaan atau manajemen SILPA. Hal ini senada dengan penelitian Pika, Saiful, Nila Aprila pada tahun (Pika, Saiful, & Aprila, 2018). Menurut Pika dan kawan kawan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap Realisasi hanya Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan. SILPA yang besar menunjukkan semakin besar pula Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan tidak faktor lainnya (Manajemen SILPA).

Pengaruh *Idle Cash* atau kas menganggur (SiLPA) berpengaruh positif terhadap manajemen SILPA

SiLPA tahun lalu merupakan penerimaan pembiayaan yang menjadi sumber pembiayaan pemerintah daerah guna menyelesaikan defisit anggaran. Besarnya jumlah SiLPA tahun lalu pada suatu tahun berjalan akan memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan defisit dan sumber pembiayaan pengeluaran. Berdasarkan teori atau konsep SiLPA, porsi pembiayaan SiLPA terhadap penerimaan pembiayaan yang cenderung naik dari tahun 2007 sampai 2011 memberikan informasi di antaranya: (1) adanya peningkatan pendapatan sehingga terjadi surplus anggaran; (2) terdapat anggaran belanja yang tidak terealisasi pada tahun bersangkutan; (3) terjadi penghematan anggaran; (4) porsi SiLPA tahun lalu dalam struktur penerimaan pembiayaan yang melampaui 90% menunjukkan bahwa SiLPA menjadi sumber pembiayaan utama dalam membiayai defisit. Besarnya porsi SiLPA tahun lalu dalam struktur penerimaan pembiayaan ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja di tahun berikutnya.

Dintinjau dari sisi teori kinerja keuangan, SiLPA yang besar dapat mengindikasikan kinerja yang baik atau tidak. Dikatakan kinerja keuangannya baik jika SiLPA berasal dari surplus anggaran, yang artinya realisasi penerimaan melebihi target sehingga penerimaan

lebih besar dari belanja. Sedangkan kinerja keuangannya dikatakan kurang baik jika SiLPA terbentuk dari banyaknya belanja yang tidak terealisasi akibat kurang baiknya perencanaan. Untuk kasus kabupaten dan kota, jika melihat pada pencapaian target PAD yang cenderung melebihi target, maka dapat dikatakan kinerja keuangannya relatif baik, sehingga berpotensi membentuk SiLPA untuk tahun bersangkutan (Hidayat, 2013).

Oleh karena itu, keraguan dan bias dari SiLPA yang tidak bisa digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan daerah atas penelitiannya Mauli Danayanti (2014) tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Realisasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi bahwa adanya SiLPA ini bisa bernilai positif dan negatif terhadap kinerja keuangan daerah dapat dibenarkan sebab memang benar bahwa pemerintah daerah di Indonesia termasuk kabupaten dan kota belum mampu menghasilkan SiLPA yang positif berasal dari efisiensi dan efektivitas anggaran yang mampu menghasilkan sisa dana bersih, namun lebih cenderung kepada pembentukan SiLPA yang negatif berasal dari sisa penggunaan anggaran yang tidak disebabkan oleh efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. (Rani, 2019). Dengan demikian hipotesis Pengaruh *Idle Cash* atau kas menganggur (SiLPA) berpengaruh positif terhadap manajemen SiLPA sejalan dengan beberapa penelitian yang ada yaitu (Hidayat, 2013 dan Rani, 2019).

Pengaruh opini berpengaruh positif terhadap manajemen SiLPA

Hubungan antara faktor suatu pemerintah daerah memperoleh predikat Opini WTP dengan hubungannya SiLPA ini tidak lain karena disebabkan oleh karena Pemerintah Daerah mampu mempertahankan opini pada tahun berikutnya. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam opini audit yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merupakan predikat tertinggi yang dicapai suatu daerah pada pengelolaan keuangan daerah karena memenuhi kriteria standar akuntansi pemerintah, kepatuhan peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan dan efektivitas. Dengan demikian, SiLPA yang dinilai tidak baik dalam pengelolaan keuangan daerah ini kontras dengan WTP. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan Vigasari (2009) tentang Hubungan Antara Opini Auditor pada LKPD, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Kinerja Keuangan Daerah bahwa jika opini yang diperoleh pemerintah

semakin baik maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian hasil penelitian penulis sejalan dengan penelitian Vigasari (2009) yang menyatakan bahwa opini perngaruh positif terhadap Pengelolaan atau manajemen SiLPA.

5. KESIMPULAN

Dengan data yang kami peroleh dan menggunakan bantuan alat bantu pengolah SPSS versi 23 kami dapat mengambil beberapa kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bagian sebelumnya dapat kami simpulkan ke dalam beberapa hal yang penting. Model yang yang digunakan dapat mewakili dari obyek penelitian yang sedang diteliti. Model yang digunakan memiliki nilai relasi yang kuat atau signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Variabel Independen *financial distress* (DSCR), *idle cash* (SiLPA) dan opini secara simultan memiliki kekuatan relasi atau hubungan yang kuat dengan variabel dependen yaitu manajemen SILPA. Arah hubungan antara variabel opini, DSCR dan SiLPA dengan SILPA bersifat positif. Artinya jika opini, DSCR dan SiLPA meningkat atau bertambah maka SILPA juga akan meningkat atau bertambah. Dengan kata lain perolehan opini yang semakin baik, tingkatan DSCR yang semakin baik dan SILPA yang semakin besar akan mempengaruhi atau menunjukkan adanya campur tangan manajemen pemerintah daerah terhadap pengelolaan SiLPA yang semakin besar.

Namun demikian secara parsial atau individu hanya SiLPA yang memiliki pengaruh positif terhadap SILPA. DSCR atau *financial distress* dan opini tidak berpengaruh positif terhadap SILPA. Financial distress yang diwakili dengan indikator DSCR tidak menunjukkan adanya arah yang sama dengan manajemen SILPA. Hal ini berbeda dengan variabel opini. Meskipun tidak berpengaruh positif namun opini justru berpengaruh secara berlawanan arah dari hasil olah data yang ada. Opini yang tinggi menyebabkan manajemen SILPA rendah. Hal ini menunjukkan jika pemeriksian efektif maka akan mampu menekan praktik manajemen SILPA pada akhir tahun.

Realisasi anggaran pada pemerintah daerah masih cenderung *slow andback loaded* yang artinya dari Januari bergerak perlahan hingga menjelang akhir tahun. Pola penyelesaian belanja dari program dan kegiatan lebih besar diakhir tahun terlihat dari realisasi anggaran pada pemerintah daerah dikarenakan realisasi kas masuk atau

pendapatan yang juga cenderung lebih besar menjelang akhir tahun. Situasi ini mendorong adanya sisa kas akhir tahun yang cenderung meningkat karena berbagai faktor antara lain kegagalan pelaksanaan program kegiatan, faktor alam, dan keinginan pemerintah daerah untuk menjadikannya sisa anggaran guna pendanaan tahun berikutnya.

6. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data yang belum sampai pada tahun anggaran 2020. Hal ini disebabkan karena laporan hasil audit tahun 2020 belum selesai dan belum dipublikasikan. Keadaan ini mengakibatkan keterbatasan dari penelitian ini dan kesimpulan yang peneliti peroleh belum dapat digeneralisir untuk skala waktu yang lebih panjang. Saran yang dapat kami sampaikan antara lain adalah perlunya memasukan variabel lain yang lebih sesuai. Saran lainnya kami memberikan pertimbangan agar antara tingkatan akrual dan diskresi manajemen pemerintah daerah dapat digunakan dalam waktu yang bersamaan sebagai variabel bebas. Hal ini karena nilai pengaruh variabel non prediksi masih cukup besar yaitu 44,5%.

PERSEMBAHAN (UCAPAN TERIMKASIH)

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar dengan dukungan dari Universitas Sriwijaya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sriwijaya dan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dana penelitian bersumber dari Hibah Penelitian untuk Skema Sains, Teknologi, dan Kebudayaan LPPM Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2020. Sebagai peneliti, kami berterima kasih atas dukungan yang sangat baik dari berbagai pihak tersebut. Semoga kedepannya semakin lancar dan semakin banyak kolaborasi yang berkualitas yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, F. (2015, Juni). Perencanaan Kas sebagai Implementasi dari Pengelolaan APBD yang Baik.
BPK. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPK.

- BPKAD. (2017, april 24). *BPKAD Kota Bekasi*. Dipetik januari 1, 2020, dari BPKAD Kota Bekasi: <https://bpkad.bekasikota.go.id/2017/04/27/peran-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-dalam-pengambilan-kebijakan-desentralisasi-fiskal/>
- Budi Purbayu Santosa, A. (2005). *Analisis Statistik dengan microsoft excell dan SPSS*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Carmeli, A. (2003). Introduction: Fiscal and Financial Crises of Local Governments. *International Journal of Public Administration, Vol. 26, No. 13*, 396-418.
- Cohen, S., Bisogno, M., & Malkogianni, I. (2016). Local Government's Earning management: Greek and Italian Evidence. *SSRN*.
- Dechow, P. S., & Sweeney. (1995). Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 193-25.
- DeFond, M. a. (1994). Debt covenant violation and manipulation of Accrual . *Journal of accounting and economics*, 145-76.
- DJPk. (2019, Agustus 20). <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. Dipetik agustus 2019, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Ferreira, A., Carvalho, J., & Pinho, F. (2013). Earnings Management Arround Zero. *Public Management Review*, 657-686.
- Gaddour, H. (2012). Financial Performance Management At Local Governments In The Netherlands.
- Heriberta, Tasman, A., & Yanilia. (2018). Analysis of budget spending and its affect on jambi Government performance. *Jurnal Perpsektif pembiayaan dan pembangunan daerah , vol 5 no 4 april-june 2018*, 244-256.
- Hribar, P., & Collins, D. W. (2002). Errors in Estimating Accruals: Implications for Empirical Research . *Journal Of Accounting Research*, (pages 105-134).
- Irwan, N., Mochamad, M., & Hatta, T. (2018). Scenario planning for the acceleration of regional budget absorption: study on the government of east Kotawaringin. *Eurasia:Economics and Busines 69120 , jjune 2018*, 24-30.
- John M. Trussel, P. A. (2013). Predicting fiscal distress in special district governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 25 Issue: 4, 2013*, pp.589-616.
- Jonathan, S. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. *Journal Accounting Research*, 193-228.
- K.Urahn, S., Ettlinger, M., Atwell, M. S., Fehr, S., Huh, K., & Russel, A. (2013). The State ROle Local Government Financial Distress. *The Pwoer Charitabel Trust*.
- Kemendagri. (2016). Pedoman Penyusunan APBD.
- Kemenkeu. (2019, desember jumat). *Beranda*. Dipetik desember Desember 27, 2019, 2019, dari Kementerian Keuangan: <https://www.kemenkeu.go.id/berita/pemerintah-akan-pantau-dana-idle-di-daerah>
- Leone, A., & Van Horn, R. (2005). How do nonprofit hospitals manage earnings?. *Journal of Health Economics*, 24:4, pp815-37.
- M.Kuroki. (2018). Earning Management toward zero: evidence from Japanese Private Colleges and Universities. *TJAR/Conference*.
- Mochamad Fajar Hidayat, G. M. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah.
- Parker, S., Peters, G., & Turetsky, H. F. (2002). Corporate governance and corporate failure: a survival analysis. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 4-12.

- Perrin, D. H., & Whiteoak, M. E. (1993). *Public sector Accounting and Financial Control*. London: Chapman and Hall.
- Pika, Saiful, & Aprila, N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisalebih Pembiayaan Anggaran, Pinjamandaerah Terhadap Realisasi Belanjamodal Sumatera Selatan. *Journal Fairnes Volumen 2*, 125-140.
- Rahmawati, W. (2017, Oktober 12). *Kontan.Co.Id*. Dipetik 2020, dari Kontan.Co.Id.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumberdaya manusia dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada provinsi sumatera barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 710-726.
- Rani, Y. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Sisalebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dankinerja Keuangan DAERAH(Studi pada 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur Tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* .
- Subramanyam, K., & Wild, J. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugianto, D. (2019, Maret Minggu). *finance.detik.com*. Dipetik Maret Minggu, 2019, dari [finance.detik.com: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3667993/bpk-temukan-15000-masalah-di-pemerintah-pusat-daerah-dan-bumn](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3667993/bpk-temukan-15000-masalah-di-pemerintah-pusat-daerah-dan-bumn)
- Suhanda, E. (2012). Strategi Optimalisasi Kas Menganggur (Idle Cash) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *UGM*.
- Syukri, A. (2013, Maret Minggu). *Blog Syukri Abdullah*. Dipetik Maret Minggu, 2013, dari Blog Syukri Abdullah.
- Trussel, J. M., & Patrick, P. A. (2013). Predicting fiscal distress in special district governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 25 Issue: 4, 2013*, pp.589-616.
- Walker, S. J. (2007). Explanators of Local Government Distress. *ABACUS, Vol. 43, No. 3, 2007*, , 396, 418.
- Walker, S. J. (2007). Explanators of Local Government Distress. *ABACUS, Vol. 43, No. 3, 2007*, 396-418.
- Warfield, T. W., & Wild, K. (1995). Managerial ownership, accounting choices, and informativeness of earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 61-91.